

**PENGARUH EKSPOR KOMODITAS KOPI,
INFLASI DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) PROVINSI LAMPUNG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2014 –
2021**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Ekonomi Islam**

Oleh:

**Arnova Witiar Nidah
NPM. 1951010036**



Program Studi : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PENGARUH EKSPOR KOMODITAS KOPI,
INFLASI DAN BELANJA DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) PROVINSI LAMPUNG MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2014 –
2021**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**Arnova Witiar Nidah
NPM. 1951010036**

Program Studi : Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M.E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, akan dijelaskan terlebih dulu istilah yang digunakan dalam skripsi ini agar menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami judul skripsi dan memudahkan pembaca dalam mengkaji isinya, serta membahas ruang lingkup penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Ekspor Komoditas Kopi, Inflasi Dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014 – 2021”**. Berikut adalah istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.¹

2. Ekspor

Ekspor adalah aktivitas perdagangan luar negeri yang melakukan pengiriman dan penjualan barang maupun jasa ke pasar luar negeri.²

3. Komoditas Kopi

Komoditas adalah barang dagangan utama atau benda niaga.³ Kopi merupakan biji-bijian dari pohon jenis

¹ Lucky Riana Putri, “Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota Surakarta”, *Cakra Wisata*, Vol. 21, No. 1, (2020). 45.

² Detri Karya and Syamri Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017). 150.

³ , “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)”, accessed January 17, 2023, <https://kbbi.web.id/komoditas>, Accessed January 17, 2023.

coffea dalam famili *Rubiaceae*, subfamili *Ixoroideae*, dan suku *Coffeae*.⁴

4. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.⁵

5. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.⁶

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.⁷

7. Perspektif

Perspektif berasal dari Bahasa Italia "*Prospettiva*" yang berarti gambaran atau pandangan. Perspektif dapat dikatakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu digunakan dalam melihat suatu fenomena.⁸

8. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam rangka alam mencari ma'isyah

⁴ Sihotang Vinsensia Arniaty, "Hubungan Kebiasaan Minum Kopi Dengan Peningkatan Tekanan Darah Pada Masyarakat Di Desa Ponjian Pegagan Julu X Sumbul Kabupaten Dairi", 2019.

⁵ Erika Feronika Br Simanungkalit, "Pengaruh Inflasi", *Journal of Management*, Vol. 13, No. 3, (2020).

⁶ Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah", *Inovasi*, Vol. 14, No. 1, (2018), 44.

⁷ Putri, "Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota Surakarta.", 45.

⁸ Elvinaro Ardianto and Bambang Q-Aness, *Filsafat Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), 50.

(penghidupan individual maupun kelompok/negara) sesuai dengan ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadist).⁹

Dengan merujuk kepada beberapa definisi di atas, tujuan dari penegasan judul di atas adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh ekspor kopi, inflasi dan belanja daerah terhadap PDRB Provinsi Lampung berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan ekonomi yang menggambarkan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam aktivitas ekonomi masyarakat yang menghasilkan peningkatan output dan pendapatan nasional serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin meningkat pula barang yang dihasilkan dan pendapatan nasionalnya. Peningkatan pendapatan nasional dibuktikan dengan besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk menunjukkan pendapatan daerahnya dapat diturunkan dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahunnya.¹⁰ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya adalah data dan informasi dasar tentang kegiatan perekonomian daerah. Menurut definisinya, PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah (provinsi)

⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro Dan Makro*, (Graha Ilmu, 2008).

¹⁰ Tarmizi, Siti Hodijah, and Rosmeli Rosmeli, "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing Dan Ekspor Terhadap PDRB Provinsi Jambi Periode 2000- 2016", *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, Vol. 8, No. 3, (2020),155–164.

menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu.¹¹

Dalam Teori Pertumbuhan ekonomi modern, Simon Kuznets mendefinisikan pembangunan ekonomi suatu negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada rakyatnya, peningkatan kapasitas ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian teknologi yang diperlukan.¹² Menurutnya pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dibutuhkannya. Definisi ini memiliki tiga komponen. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus menerus. *Kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan tingkat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka macam barang kepada penduduk. *Ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat secara tepat. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercermin dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah.¹³

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Simon Kuznets di atas, dapat memberikan pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah adalah meningkatnya kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi

¹¹ BPS Provinsi Lampung, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*, Nurul Andriana, Drisnaf Swastyardi (Ed.), (Trans.), (Lampung: BPS Provinsi Lampung, 2022).

¹² Anggel Dwi Satria, Ridwansyah, and Ahmad Habibi, “Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis Dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, , Vol. 9, No. 01, (2023).

¹³ Abdul Rahim and Andi Samsir, “Analysis The Influence of Investment Level, Government Spending , Labor To Economic Growth In Bulukumba District”, 2018. 3.

masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang mencoba menganalisis bagaimanakah pengaruh ekspor kopi, inflasi dan belanja daerah terhadap PDRB yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pada teorinya, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh kemajuan teknologi dan perkembangan kelembagaan, serta adaptasi teknologi yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini dapat diinterpretasikan dengan bagaimanakah kemajuan teknologi dalam sektor produksi dan pemasaran kopi untuk di ekspor, perkembangan kelembagaan dan adaptasi teknologi yang efektif untuk mendukung ekspor, pengelolaan inflasi dan efisiensi belanja daerah turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB.

Provinsi Lampung sebagai daerah dengan letak dan kondisi geografisnya antara lain sebagai pintu gerbang Sumatra dan daerah yang lahannya luas memiliki potensi sebagai salah satu titik distribusi barang jasa nasional yang ditunjang dengan sumber daya yang dimiliki oleh provinsi Lampung. Keberhasilan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tercermin dari PDRB Provinsi Lampung berikut ini:

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung
Tahun 2014-2021 (Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)
2014	189.797
2015	199.536
2016	209.793
2017	220.626
2018	232.165
2019	244.378

2020	240.319
2021	246.966

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2014-2021

Berdasarkan tabel di atas, nilai PDRB Lampung atas dasar harga konstan 2014 sampai 2019 menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2020 PDRB provinsi Lampung menunjukkan penurunan sebesar Rp. 4.058.720.960.000,00 dari tahun sebelumnya, dengan nilai PDRB menjadi sebesar 240.319 miliar rupiah. Selanjutnya PDRB tahun 2021 mencapai 246.966 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar Rp 6.646.898.950.000,00 dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan ditengah masih berlangsungnya pandemi *covid-19*. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2021.¹⁴

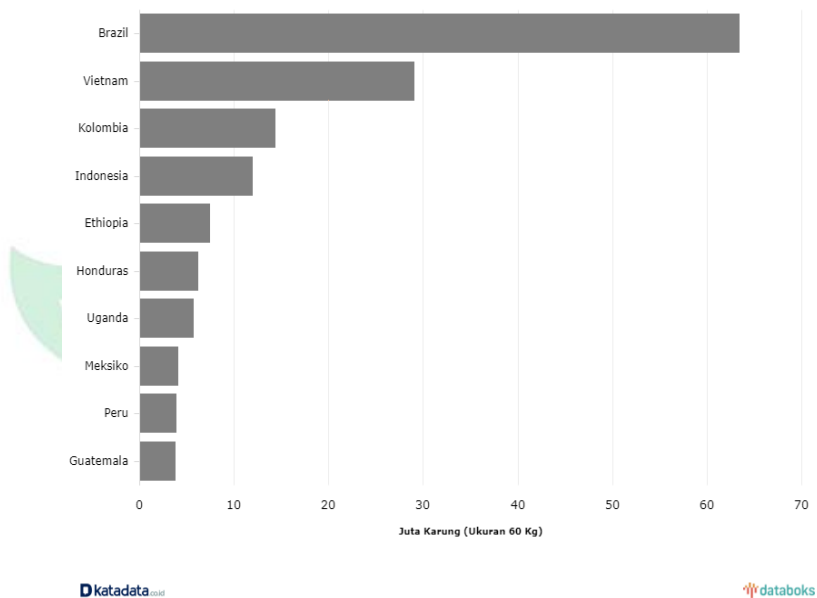
Pentingnya meneliti PDRB provinsi lampung guna memahami kondisi ekonomi, mengidentifikasi peluang, dan merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Dalam penelitian ini yang digunakan ialah PDRB atas dasar harga konstan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi PDRB yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini akan meneliti beberapa faktor yang diduga mempengaruhi PDRB Provinsi Lampung yaitu ekspor komoditas kopi, inflasi dan belanja daerah.

Variabel independent pertama dalam penelitian ini adalah ekspor komoditas kopi. Berdasarkan teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson memandang bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

¹⁴ Badan Pusat Statistik, “Provinsi Lampung Dalam Angka 2022”, *BPS Provinsi Lampung*, Vol. 2, No. 2, (2022). 657

ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor wilayah tersebut..¹⁵ Pernyataan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRBnya. Peningkatan ekspor akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dikarenakan berlakunya *multiplier effect* terhadap peningkatan daerah. *Multiplier effect* tersebut akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).¹⁶

Gambar 1.1
10 Negara Penghasil Kopi Terbesar Di Dunia



Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun 2020 setelah Brazil, Vietnam dan kolombia.

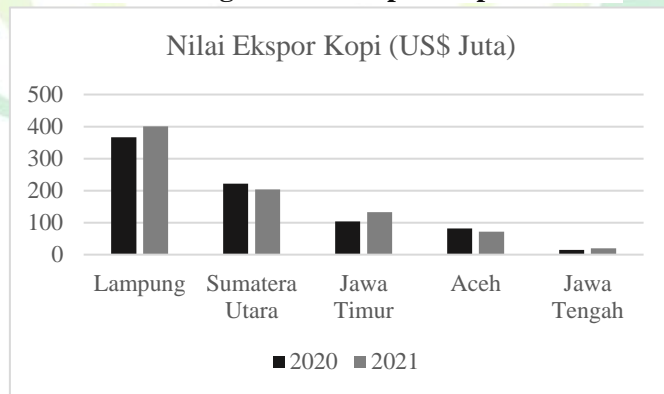
¹⁵ Satria, Ridwansyah, and Habibi, “Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis Dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

¹⁶ Almasdi Syahza, “Perkembangan Ekspor Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Riau”, *Sosiohumaniora*, Vol. 5, No. 2, (2003), h. 148.

Berdasarkan data International Coffee Organization (ICO), produksi kopi di Brazil sebesar 63,4 juta karung berukuran 60 kilogram (kg). Vietnam berada di posisi kedua dengan produksi kopi mencapai 29 juta karung. Setelahnya ada Kolombia dengan ekspor kopi sebanyak 14,3 juta karung . Indonesia menempati posisi keempat dengan produksi kopi sebesar 11,95 juta karung. Setelahnya ada Ethiopia dengan produksi kopi sebanyak 7,37 juta karung. produksi kopi di Honduras dan Uganda masing-masing sebanyak 6,1 juta karung dan 5,62 juta karung. Lalu, Meksiko mampu memproduksi 4 juta karung kopi. Peru tercatat menghasilkan 3,8 juta karung kopi. Sedangkan, produksi kopi di Guatemala tercatat sebesar 3,75 juta karung kopi.¹⁷

Di Indonesia sendiri, salah satu provinsi penyumbang ekspor kopi terbesarnya adalah Provinsi Lampung. Berikut adalah data provinsi dengan ekspor kopi terbesar di Indonesia :

Gambar 1.2
Provinsi dengan Nilai Ekspor Kopi Terbesar



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2014-2021

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020-2021 Lampung menjadi provinsi dengan nilai ekspor

¹⁷ Vika Azkiya Dhini, “Brasil Rajai Produksi Kopi Pada 2020, Indonesia Urutan Berapa?”, *Databoks.Katadata.Co.Id*2021 h. 2020.

kopi terbesar nasional. Pada 2021 nilai ekspor kopi dari Lampung mencapai USD 400,6 juta atau sekitar Rp6 triliun. Jumlah ini setara dengan 47,2% dari total nilai ekspor kopi nasional pada tahun tersebut. Sumatra Utara berada di posisi kedua dengan nilai ekspor USD 204,1 juta pada 2021. Diikuti Jawa Timur dengan nilai ekspor USD 133 juta, Aceh sebesar USD 71,7 juta, dan Jawa Tengah USD 19,5 juta. Sementara itu, akumulasi nilai ekspor kopi dari provinsi-provinsi lainnya berjumlah USD 20,4 juta pada 2021. Data ini juga menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Sumatra, yakni Lampung, Sumatra Utara, dan Aceh berkontribusi sangat besar dalam ekspor kopi nasional. Gabungan ketiganya berkontribusi 79,81% terhadap total nilai ekspor kopi Indonesia pada 2021.¹⁸

Dalam bidang ekspor, sektor pertanian memegang peranan penting yang memenuhi kebutuhan pangan nasional. Salah satu produk unggulan dalam sektor pertanian Provinsi Lampung adalah kopi.¹⁹ Kopi merupakan subsektor pertanian yang berperan penting bagi perekonomian nasional, terutama sebagai sumber devisa, lapangan kerja dan pendapatan bagi petani dan usaha lain yang terlibat dalam budidaya, pengolahan dan pemasarannya. produk kopi dan juga berkontribusi pada upaya konservasi lingkungan.²⁰ Berikut disajikan data ekspor kopi provinsi Lampung:

Tabel 1.2
Ekspor Komoditas Kopi Lampung 2014-2021 (USD)

Tahun	Nilai USD
2014	432.700.963,00

¹⁸ Vika Azkiya Dihni, “5 Provinsi Pengekspor Kopi Terbesar, Lampung Juara”, *Databoxs*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/14/5-provinsi-pengekspor-kopi-terbesar-lampung-juara>, Accessed June 19, 2023.

¹⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Warta Ekspor”, 2018. 6.

²⁰ Wilda Kartika, H M Mozart B Darus, and Sri Fajar Ayu, “Analisis Kontribusi Ekspor Kopi Terhadap PDRB Sektor Perkebunan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Ekspor Kopi Sumatera Utara”, *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, Vol. 2, No. 10, (2013). 3

2015	581.393.007,10
2016	442.850.831,92
2017	610.717.847,39
2018	246.758.277,57
2019	332.161.604,90
2020	366.996.131,70
2021	400.617.635,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2014-2021 (Data diolah)

Berdasarkan data ekspor kopi di atas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2014 – 2021 masih menunjukkan bahwa nilai ekspor kopi provinsi Lampung masih berfluktuasi dengan total nilai ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 610.717.847,39 USD dan terendah pada tahun 2018 dengan jumlah 246.758.277,57 USD.

Variabel independent yang kedua dalam penelitian ini adalah inflasi. Inflasi merupakan faktor fundamental makro dari indikator makroekonomi yang menggambarkan kondisi ekonomi yang kurang sehat, karena harga-harga barang secara umum meningkat sehingga melemahkan daya beli masyarakat yang tentu saja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori Keynesian, Inflasi terjadi karena masyarakat berusaha untuk hidup di atas batas kemampuan ekonomi mereka, sehingga mengakibatkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang dan jasa (permintaan agregat) melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia (penawaran agregat) sehingga memicu kenaikan harga.²¹ Model Keynesian terdiri dari kurva *Agregat Demand* (AD) dan *Agregat Supply* (AS), yang tepat menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan.²² Inflasi memiliki pengaruh negatif

²¹ Adwin S. Atmadja, “Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. Vol. 1 No., .

²² Simanungkalit, “Pengaruh Inflasi.” 331.

terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari PDRBnya karena meningkatnya harga-harga yang digambarkan memicu naiknya tingkat inflasi yang dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga melemahkan pertumbuhan ekonomi. Berikut disajikan data terkait inflasi daerah provinsi Lampung:

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2014 -2021

Tahun	Inflasi (Persen)
2014	8,06
2015	4,34
2016	2,78
2017	3,02
2018	2,73
2019	3,44
2020	2,00
2021	2,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2014-2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik provinsi Lampung , tingkat inflasi Lampung masih berfluktuasi dimana selama tahun 2015-2016 mengalami penurunan , lalu pada 2017 mengalami peningkatan, 2018 mengalami penurunan, 2019 kembali meningkat, dan tahun 2020 kembali menurun kemudian tahun 2021 meningkat Kembali. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,06% dan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 2%.

Variabel independent yang ketiga dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Belanja daerah penting diteliti karena dapat mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran yang tentu saja berkaitan

erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan yang dimana pertumbuhan suatu daerah salah satunya dapat dilihat melalui PDRB nya. Menurut pandangan kaum Keynesian, secara teori hubungan belanja daerah terhadap PDRB dapat dibuat rumus $Y = C + I + G$. Artinya belanja daerah memiliki hubungan positif dengan PDRB, dimana jika pengeluaran pemerintah (G) bertambah maka pendapatan (Y) akan meningkat.²³ Pernyataan tersebut menunjukkan adanya hubungan dan pengaruh positif dari belanja daerah terhadap PDRB suatu wilayah. Alokasi anggaran daerah merupakan salah satu kebijakan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. APBD berperan penting sebagai instrumen untuk mengalokasikan, mendistribusikan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut disajikan data terkait belanja daerah provinsi Lampung :

Tabel 1.4
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2021
(Miliar Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah Provinsi Lampung (Miliar Rupiah)
2014	4.454
2015	4.781
2016	5.477
2017	7.030
2018	7.539
2019	7.059
2020	6.856
2021	7.098

²³ Machmud Al Amrie, Adi Aspian Nur, and Amelia Ramadhani, "Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara", 2019. 7

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2014-2021

Berdasarkan data di atas yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2014 – 2021 menunjukkan bahwa nilai belanja daerah provinsi Lampung masih berfluktuasi atau mengalami naik dan turun, dengan total belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 7.539 miliar rupiah dan terendah pada tahun 2014 dengan jumlah 4.454 miliar rupiah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, menurut Ibn Khaldun kekayaan negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut.²⁴ Dalam konteks penelitian ini teori tersebut memberikan pemahaman bahwa ekspor dapat meningkatkan produksi dan pendapatan domestik suatu daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi PDRB. Selain itu Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja daerah yang efektif dan efisien dapat mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan PDRB.

Dalam ekonomi Islam PDRB secara fungsional akan mempengaruhi penerimaan pajak dengan meningkatnya pendapatan pajak, wakaf, zakat, sedekah dan pendapatan lainnya yang akan memberikan dampak baik dikarenakan meningkatnya suatu penerimaan negara, maka makin optimal pengeluaran negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.²⁵ PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi, dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai iman dan takwa. Pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam Q.S. Nuh ayat 10-12:²⁶

²⁴ Yosi Aryanti, “Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik”, *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018). 159

²⁵ Siti Nurjanah, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam”, *Economic Journal* 2018.

²⁶ Departemen Agama and RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2010). 570.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝١١
وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ۝ وَيَبَيِّنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ ۝ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝١٢

“Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, 11. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 12. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Q.S. Nuh [71]: 10-12)

Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S. Al-Ar'raaf ayat 96:²⁷

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٩٦

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Q.S. Al-Ar'raaf [7]: 96)

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa aspek terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan adalah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Allah telah menjanjikan rezeki yang melimpah dan kemajuan ekonomi, jika manusia senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai iman dan taqwa. Namun, ketidaktaatan dan ketidakpercayaan akan mengakibatkan perselisihannya dan hilangnya kedamaian dan ketenangan.²⁸

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang mengacu pada teori serta penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekspor ,

²⁷ *Ibid.*, 151.

²⁸ Moch Zainuddin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal: Stain Kediri, Hlm*, Vol. 1 No.2, (2017), h. 126.

inflasi dan belanja daerah memiliki korelasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. PDRB sendiri penting untuk diteliti karena untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan meneliti PDRB provinsi Lampung, kita dapat melihat perubahan dalam nilai tambah ekonomi dari tahun ke tahun yang membantu kita memahami apakah provinsi Lampung sedang mengalami pertumbuhan, stagnasi atau penurunan. Namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik provinsi Lampung menunjukkan bahwa nilai PDRB Provinsi Lampung dan variabel independen yang disebutkan pada penelitian ini masih berfluktuasi, serta belum banyaknya penelitian yang menyelidiki bagaimana pengaruh ekspor kopi, inflasi dan belanja daerah terhadap PDRB dalam perspektif ekonomi Islam, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh nilai ekspor kopi yang merupakan salah satu komoditas unggulan provinsi lampung, tingkat inflasi dan belanja daerah terhadap PDRB di Provinsi Lampung tahun 2014-2021 menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini bertujuan untuk kekosongan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh variabel-variabel tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. PDRB provinsi Lampung selama 8 tahun periode sejak 2014- 2021 masih mengalami fluktuasi, dimana mengalami peningkatan dari 2014 sampai dengan 2019. Kemudian PDRB provinsi Lampung menurun pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan ditahun 2021.
2. Berdasarkan latar belakang, ketiga variabel x (ekspor komoditas kopi, inflasi dan belanja daerah) yang memiliki hubungan dengan variabel y (PDRB) masih mengalami fluktuasi.

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini maka peneliti membatasi masalahnya dimana data diperoleh yaitu dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan secara *Time Series* atau berturut-turut selama delapan tahun (2014-2021).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas ditarik pokok permasalahannya, yaitu :

1. Apakah ekspor komoditas kopi berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Lampung 2014 -2021 ?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2014 – 2021 ?
3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2014 – 2021 ?
4. Adakah pengaruh secara simultan ekspor komoditas kopi, inflasi dan pengeluaran daerah terhadap PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2014-2021 menurut perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya, yaitu :

1. Untuk menganalisis apakah nilai ekspor komoditas kopi berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Lampung 2014 - 2021.
2. Untuk menganalisis apakah inflasi berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Lampung 2014 -2021.
3. Untuk menganalisis apakah belanja daerah berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Lampung 2014 -2021.
4. Untuk menganalisis adakah pengaruh secara bersama-sama antara ekspor komoditas kopi, inflasi dan belanja daerah terhadap PDRB Provinsi Lampung tahun 2014 – 2021 menurut perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membawa manfaat untuk pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekspor kopi, inflasi dan belanja daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pengaruh Ekspor kopi, inflasi dan belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dan dapat memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya tentang pengaruh ekspor komoditas kopi, inflasi dan belanja daerah serta pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung menurut perspektif ekonomi Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bermanfaat untuk dijadikan perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil hasil penelitian terdahulu menyangkut ekspor, inflasi dan belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ” **Pengaruh Ekspor Komoditas Kopi, Inflasi Dan Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014 – 2021.**”

Tabel 1.5
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Tarmizi, Siti hodijah, Rosmel (2020)	Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Ekspor Terhadap PDRB Provinsi Jambi Periode 2000-2016.	Kuantitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh selama periode 2000- 2016 penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Jambi. ²⁹
2	Yois Nelsari Malau, Lilyana Loren, Catherin e, Selvia	Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Ekspor Terhadap PDRB Di Provinsi	Kuantitatif deskriptif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Investasi secara parsial tidak berpengaruh pada PDRB,

²⁹ Tarmizi Tarmizi, Siti Hodijah, and Rosmeli Rosmeli, "Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing Dan Ekspor Terhadap PDRB Provinsi Jambi Periode 2000-2016", *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, Vol. 8, No. 3, (2020), h. 155–164.

	Hendra (2020)	Sumatera Utara Periode 2017-2019.		Tenaga Kerja secara parsial berpengaruh pada PDRB, Ekspor secara parsial tidak berpengaruh pada PDRB. ³⁰
3	Nichauri Elsa Maysari (2022)	Analisis Pengaruh Ekspor, UMP, dan PMA Terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekspor memiliki pengaruh positif yang signifikan, Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif signifikan dan Penanaman Modal Asing memiliki dampak positif dan

³⁰ Lilyana Loren Lilyana, Selvia Hendrawan Selvia, and Yois Nelsari Malau, "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Ekspor Terhadap Pdrb Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol. 4, No. 3, (2020). 1711–1724.

				tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur. ³¹
4	Irfan Ackhadi (2019)	Pengaruh Inflasi, Kenaikan Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap PDRB provinsi Banten 2010-2017	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB di provinsi Banten pada tahun 2010-2017. Kenaikan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi Banten 2010-2017. Jumlah penduduk

³¹ Nichauri Elsa Maysari, “Analisis Pengaruh Ekspor, UMP, Dan PMA Terhadap PDRB Di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, (2022), 168–177.

				berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi Banten tahun 2010-2017. Inflasi, kenaikan upah minimum, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap PDRB provinsi banten 2010-2017. ³²
5	Siti Nurul Afiyah (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Laju Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 1998 – 2008	Kuantitatif Deskriptif	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota Malang yaitu sebesar

³² Irfan Ackhadi, “Pengaruh Inflasi, Kenaikan Upah Minimum Dan Jumlah Penduduk Terhadap PDRB Provinsi Banten 2010-2017”, 2019. 45.

		Menggunakan Program Minitab 14.		66.5% sedangkan satu variabel bebas lainnya yaitu laju inflasi berpengaruh tidak signifikan hal ini dikarenakan adanya laju inflasi berpengaruh tidak secara langsung. ³³
6	Lisa Puspitari (2021)	Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Di Kabupaten Berau.	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan, kuat dan positif antara Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap

³³ Siti Nurul Afiyah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Laju Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 1998-2008 Menggunakan Program Minitab 14", *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, Vol. 5, No. 2, (2011). 52-59.

				<p>PDRB ADHK Di Kabupaten Berau yang di tunjukkan oleh koefisien determinasi sebesar 0,863 atau 86,3%. Hal ini berarti bahwa Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung mempengaruhi PDRB ADHK sebesar 86,3% sedangkan sisanya sebesar 13,7% di pengaruhi oleh factor-faktor lain. Dengan demikian bahwa hipotesis yang dikemukakan</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				dapat diterima. ³⁴
7	Salbia Taher, Antje Tuasela (2019)	Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuh an Ekonomi Di Kabupaten Mimika	Kuantitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten Mimika terutama dalam aspek pengeluaran

³⁴ Lisa Puspitasari and Universitas Muhammadiyah Berau, "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Di Kabupaten Berau", *Eco-Build Journal*, Vol. 5, No. 1, (2021).

				pemerintah belum mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. ³⁵
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB suatu daerah. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dengan menggabungkan dan menekankan beberapa variabel independennya secara rinci dan lebih mendalam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jenis variabel independent yang digunakan, periode waktu serta objeknya. Penelitian ini menggabungkan variabel ekspor komoditas kopi, inflasi dan belanja daerah yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung tahun 2014 – 2021 dan akan di analisis dalam perspektif ekonomi islam.

H. Sistematika Penulisan

Bagian ini berisi uraian singkat tentang cara penulisan materi dalam penelitian ini, dan metodologi penulisan akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi pendahuluan, latar belakang, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB II LANDASAN TEORI

³⁵ Salbia Taher and Antje Tuasela, “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika”, , Vol. 3, (2019).

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian titik bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori yang digunakan untuk menentukan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

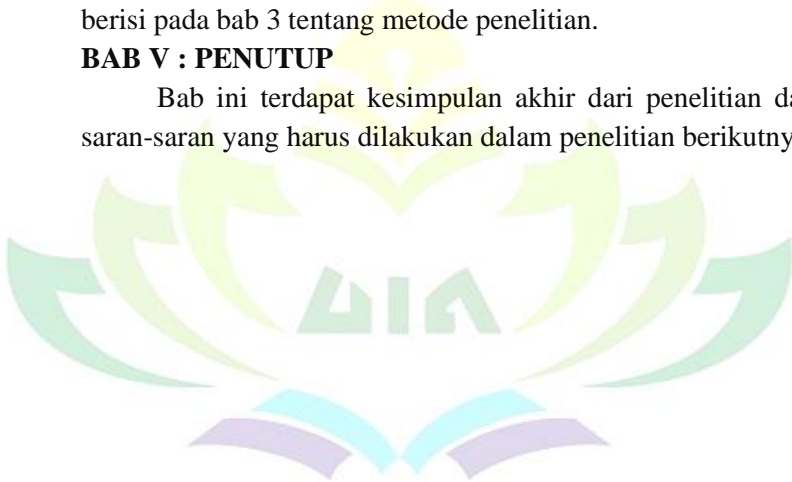
Bagian ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian titik metode ini meliputi sifat dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, definisi variabel yang digunakan, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dan analisis penelitian, yang berisi pada bab 3 tentang metode penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdapat kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran yang harus dilakukan dalam penelitian berikutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai total output barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun.³⁶ Produk Domestik Bruto Regional menggambarkan hasil keseluruhan dari nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan regional atau setiap provinsi dalam satu tahun.³⁷

Terkait Produk Domestik Regional Bruto, terdapat beberapa istilah penting sebagai berikut:

- a. Wilayah Domestik dan Regional, yaitu merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).
- b. Produk Domestik, yaitu semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu

³⁶ Putri, "Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota Surakarta." 45

³⁷ Silfia Nadilla Pattikawa and Kezia Yohana Zai, "Peningkatan PDRB Kota Padang Melalui Industri Pariwisata", *Manajemen Ekonomi Keuangan Dan Akuntansi (MEKA)*, Vol. 2, No. 1, (2021), h. 95–98.

daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

- c. Produk Regional, yaitu produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.³⁸

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang saling berbeda namun mempunyai satu pengertian yang sama.³⁹

- a. Dari sudut pandang produksi diartikan sebagai jumlah nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 kelompok lapangan usaha, yaitu :⁴⁰
 - 1) Sektor Pertanian Sektor ini terdiri dari 5 sub sektor, yaitu :
 - a) Tanaman Bahan Makanan
 - b) Tanaman Perkebunan

³⁸ , “Badan Pusat Statistik”, *Bps.go.id*, accessed April 9, 2023, <https://www.bps.go.id/>, Accessed April 9, 2023.

³⁹ Katalog Bps, “Kerjasama : BAPPEDA Kabupaten Kudus Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)”, 2012. h.3

⁴⁰ *Ibid.* 4-6

- c) Peternakan
 - d) Kehutanan
 - e) Perikanan
- 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor ini terdiri dari 3 sub sektor yaitu :
 - a) Minyak dan Gas Bumi
 - b) Pertambangan tanpa Migas (Minyak dan Gas Bumi)
 - c) Penggalian
 - 3) Sektor Industri Pengolahan Sektor ini terdiri dari 2 sub sektor yaitu:
 - a) Industri Migas (Industri Pengilangan Minyak dan Industri Gas Alam Cair)
 - b) Industri Tanpa Migas
 - 4) Sektor Listrik, Gas dan Air Sektor ini terdiri dari (3) tiga sub sektor yaitu :
 - a) Listrik
 - b) Gas Kota
 - c) Air Bersih
 - 5) Sektor Bangunan Sektor ini akan dipecah menjadi 2 sub sektor yaitu:
 - a) Bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal
 - b) Bangunan Lainnya Pada tingkat daerah dimungkinkan untuk tidak dipecah ke dalam sub sektor, tetapi masih satu kesatuan di sektor bangunan.
 - 6) Sektor Perdagangan , Hotel dan Restoran Sektor ini terdiri dari 3 (tiga) sub sektor, yaitu :
 - a) Perdagangan Besar dan Eceran
 - b) Perhotelan (termasuk 'homestay')
 - c) Restoran
 - 7) Sektor Angkutan dan Komunikasi Sektor ini terdiri dari 7 sub sektor,yaitu :
 - a) Angkutan Darat (Rel dan Jalan Raya)
 - b) Angkutan Laut

- c) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - d) Angkutan Udara
 - e) Jasa Penunjang Angkutan
 - f) Pos dan Telekomunikasi
 - g) Jasa Penunjang Komunikasi
- 8) Sektor Lembaga Keuangan, Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan Sub sektor ini terdiri dari 5 sub sektor :
- a) Bank
 - b) Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - c) Jasa Penunjang Lembaga Keuangan
 - d) Sewa Bangunan
 - e) Jasa Perusahaan
- 9) Sektor Jasa-jasa Sektor ini terdiri dari 4 (empat) sub sektor, yaitu :
- a) Pemerintahan dan Pertahanan
 - b) Jasa sosial dan Kemasyarakatan
 - c) Jasa Hiburan dan Rekreasi
 - d) Jasa Perorangan dan Rumahtangga
- b. Dari sudut pandang pendapatan, diartikan sebagai jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah/gaji, sewa tanah, bunga modal dan balas jasa skill/keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian Produk Domestik Regional Bruto, kecuali balas jasa faktor produksi seperti tersebut diatas termasuk pula komponen penyusutan dan pajak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara total disebut sebagai Nilai Tambah Bruto.⁴¹
- c. Dari sudut pandang pengeluaran diartikan sebagai jumlah pengeluaran oleh rumah tangga, lembaga swasta tidak mencari untung dan pengeluaran

⁴¹ *Ibid.*, 6.

pemerintah sebagai konsumen , pengeluaran untuk pembentukan modal tetap, serta perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Pengertian ekspor netto adalah jumlah nilai ekspor dikurangi jumlah nilai impor.⁴²

Dari ketiga sudut pandang tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jumlah pengeluaran berbagai komponen akan sama dengan jumlah produk akhir dari barang dan jasa, yang dihasilkan oleh produsen, akan sama pula dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat.⁴³

Produk Domestik Regional Bruto mampu dibedakan jadi 2 yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan juga PDRB atas dasar harga berlaku.⁴⁴ Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

a) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (ADHK)

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB).

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai

⁴² *Ibid.*, 7.

⁴³ *Ibid.*, 7.

⁴⁴ Pattikawa and Zai, "Peningkatan PDRB Kota Padang Melalui Industri Pariwisata.", 96.

tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.⁴⁵

2. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.⁴⁶ Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dalam perekonomian yang menyebabkan bertambahnya barang dan jasa serta meningkatnya kemakmuran disuatu negara. Jadi apabila pertumbuhan ekonomi tinggi maka barang yang akan dihasilkan juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan tingkat kesejahteraan.⁴⁷ Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu proses meningkatnya produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menambahkan output atau Pendapatan Nasional yang dapat tercermin pada PDRB suatu daerah.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi modern, Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian

⁴⁵ Ameilia Karisma and Ady Soejoto, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur”, *Ekonomi Dan Bisnis* 2010 h. 1–15.

⁴⁶ Indra Rukmana, “Pengaruh Disparitas Pendapatan, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1, No. 1, (2012), h. 27–34.

⁴⁷ Ardiansyah H, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 5(3), (2017).

teknologi yang dibutuhkannya”⁴⁸. Menurut Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang dibutuhkannya. Definisi ini memiliki tiga komponen : pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus menerus; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan tingkat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat secara tepat. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan secara makro. Pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercermin dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah.⁴⁹

3. Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan. Ketiga cara tersebut adalah:

⁴⁸ Satria, Ridwansyah, and Habibi, “Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis Dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”, 6.

⁴⁹ Rahim and Samsir, “Analysis The Influence of Investment Level, Government Spending , Labor To Economic Growth In Bulukumba District.”, 3.

- a) Cara Pengeluaran, dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.⁵⁰
- b) Cara Produksi atau cara produk netto, dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau value added yang diciptakan.⁵¹ Unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha yaitu:
- 1) Pertanian
 - 2) Pertambangan dan Penggalian
 - 3) Industri Pengolahan
 - 4) Listrik, Gas, Air bersih
 - 5) Bangunan dan Konstruksi
 - 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
 - 7) Pengangkutan dan Komunikasi
 - 8) Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 - 9) Jasa-jasa lainnya.⁵²
- c) Cara Pendapatan, dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan

⁵⁰ Siti Marlina AZ and Siska Pebrina, "Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi", *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 36.

⁵¹ *Ibid.*, 36.

⁵² Katalog BPS, "PDRB Tahun 2010", 3-5.

nasional.⁵³ Menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh factor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa factor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan.⁵⁴

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB adalah:

- a. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya; dan
- b. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apaka ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.⁵⁵

4. PDRB dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pandangan Islam mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan parameter Falah. Falah adalah kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Dimana komponen rohaniah masuk kedalam pengertian Falah, maka dari itu selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional GDP riil berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali interaksi instrument-instrumen wakaf, zakat dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam PDRB secara fungsional akan mempengaruhi penerimaan pajak dengan meningkatnya

⁵³ AZ and Pebrina, "Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi.", 36.

⁵⁴ BPS, "PDRB Tahun 2010.", 3-5.

⁵⁵ R Adisetiawan, "Ahmadi, 2016, The Impact of Earning Management Against Market Reaction: Empirical Evidence from Indonesia", *International Research Journal of Finance and Economics*, Vol. 146, , h. 112–128.

pendapatan pajak dalam bentuk wakaf, zakat dan sedekah dan pendapatan lainnya akan memberikan dampak yang baik dikarenakan meningkatnya suatu penerimaan Negara maka makin optimal pengeluaran Negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.⁵⁶ Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu ekonomi islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi yang sejahtera materi (duniawi) dan kepuasan batin (ukhrawi)⁵⁷. Pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Al-A'raf ayat 96:⁵⁸

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Q.S. Al-A'raf [7]: 96)

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa unsur pokok untuk mendatangkan kesejahteraan adalah dengan bertaqwa dan tunduk kepada Allah SWT. Allah menjanjikan rezeki yang berlimpah dan kemajuan ekonomi, apabila suatu kaum senantiasa berjalan pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Akan tetapi, kemaksiatan dan kekufuran akan menyebabkan

⁵⁶ Nurjanah, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.”

⁵⁷ P Pardomuan Siregar, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam”, , Vol. 1, No. 1, (2021).

⁵⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015).139.

kemungkarannya dan hilangnya ketenangan dan kedamaian.⁵⁹

B. Konsep Ekspor

1. Definisi Ekspor

Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dan dijual kepada pembeli di negara lain. Ekspor membentuk perdagangan internasional. Ekspor sangat penting bagi ekonomi modern karena menawarkan lebih banyak pasar kepada orang dan perusahaan untuk barang-barang mereka. Salah satu fungsi inti diplomasi dan politik luar negeri antara pemerintah adalah untuk mendorong perdagangan ekonomi, mendorong ekspor dan impor untuk kepentingan semua pihak perdagangan. Barang ekspor merupakan keuntungan bagi ekonomi suatu negara. Keuntungan tersebut akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di negara pengekspor.⁶⁰

2. Teori Ekspor

a. Teori Keunggulan Mutlak

Adam Smith mengemukakan teori tentang perdagangan internasional yang disebut *Theory of Absolute Advantage* (teori keunggulan mutlak). Menurut teori ini suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain.⁶¹

b. Teori Keunggulan Komparatif

David Ricardo mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut *Theory of Comparative Advantage* (Teori Keunggulan

⁵⁹ Zainuddin, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Prespektif Ekonomi Islam."

⁶⁰ Ulfa Hanifah, "Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, Vol. 2, No. 6, (2022), h. 107–126, <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.275>.

⁶¹ Mahyus Ekananda, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 31.

Komparatif). Menurut David Ricardo keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa secara efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain.⁶²

c. Teori Proporsi

Teori Heckscher dan Ohlin (H-O) menyatakan bahwa penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) oleh masing masing negara, selanjutnya faktor produksi menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai *The Proportional Factor Theory*. Negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya.⁶³

d. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi (*economic base theory*) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor wilayah tersebut. Menurut Lincolin Arsyad dalam Angel dkk, Teori basis yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Sehingga dalam memacu pertumbuhan suatu wilayah atau

⁶² Mahyus Ekananda, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 31.

⁶³ *Ibid.*, 62.

negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor ekonomi wilayahnya.⁶⁴

3. Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor

Terdapat faktor yang dapat memengaruhi perkembangan dari kegiatan ekspor suatu negara. Faktor-faktor tersebut antara lain berasal dan dalam negeri ataupun keadaan pada luar negeri. Beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan ekspor adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri
- b. Keadaan pasar di luar negeri dan dalam negeri
- c. Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar

Untuk dapat mengembangkan ekspor, pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain sebagai berikut. Menambah macam barang ekspor

- a. Memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor
- b. Mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri
- c. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- d. Menjaga kestabilan kurs valuta asing
- e. Pembuatan perjanjian dagang internasional
- f. Peningkatan promosi dagang di luar negeri.
- g. Penyuluhan kepada pelaku ekonomi.⁶⁵

4. Ekspor Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut catatan sejarah Islam kegiatan perdagangan internasional dan ekspor telah di praktekkan oleh Nabi Muhammad sejak usia relatif muda. Umar bin Khattab juga selalu mengingatkan para sahabat untuk memperhatikan dan mengutamakan kegiatan ekspor dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang kuat dan mandiri,

⁶⁴ Satria, Ridwansyah, and Habibi, "Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis Dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

⁶⁵ Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 85.

yaitu ekonomi yang kuat, tidak tergantung sepihak kepada negara lain.⁶⁶ Menurut Karim dalam Yosi aryanti, disebutkan bahwa menurut Ibn Khaldun kekayaan sebuah negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi kekayaan negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut. Dengan demikian, negara yang makmur adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi tersebut diekspor, dan pada akhirnya akan menambah kemakmuran di negara tersebut.⁶⁷

Terkait pembahasan ekspor ini sesuai pada firman Allah SWT tentang jual-beli yaitu dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ وَّ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..” (Q.S. An-Nisa [3]:29)

Surat An-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau harta sendiri dengan jalan yang *bathil*. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, dan jangan pula dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil hartamilik selainmu dengan cara

⁶⁶ Ahmad Syaikhon, “Pembiayaan Ekspor Syariah - Oleh: Agustianto, Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)”, *Harian Ekonomi NERACA*, 2014.

⁶⁷ Aryanti, “Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik.”, 159.

berdagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua belah pihak dan dalam koridor syar'i.⁶⁸

C. Konsep Inflasi

1. Definisi Inflasi

Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.⁶⁹ Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.⁷⁰ Menurut Model Keynesian, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat).⁷¹ Model Keynesian terdiri dari kurva *Agregat Demand* (AD) dan *Agregat Supply* (AS), yang tepat menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan. Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena nafsu berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia. Karena keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan, permintaan bertambah, sedangkan penawaran tetap, yang akan terjadi adalah harga akan naik.⁷² Ciri- ciri inflasi adalah

⁶⁸ Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surah An-Nisa 29 Dan At-Taubah 34)", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17 no.2, (2018), 249.

⁶⁹ Dr Boediono, "Ekonomi Moneter Edisi Ketiga", *Yogyakarta: BPFE*2014.

⁷⁰ Iskandar Putong, "Economis: Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro", (Edisi, 2013).

⁷¹ Atmadja, "Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya."

⁷² Simanungkalit, "Pengaruh Inflasi.", 331-333.

- a. Jumlah uang beredar lebih banyak dibandingkan jumlah barang beredar, yang ditunjukkan oleh *Agregat Demand (D)* lebih besar dari *Agregat Supply (AS)*.
- b. Harga cenderung naik secara terus-menerus. Dengan demikian, bila harga naik hanya seketika dan kemudian turun Kembali atau dengan kata lain harga naik tidak terus – menerus, maka belum dapat dikatakan terjadi inflasi.
- c. Nilai tukar uang mengalami penurunan.⁷³

Dampak inflasi yang tinggi terus-menerus, tidak saja berdampak buruk pada kegiatan ekonomi, akan tetapi dapat juga menyengsarakan masyarakat. Harga barang dan jasa yang tinggi melemahkan posisi bersaing perusahaan dalam negeridengan produk luar negeri, maka ada kecenderungan barang impor banyak masuk ke dalam negeri bila pemerintah tidak melakukan proteksi untuk melindungi posisi perusahaan yang memburuk. Kenaikan volume impor yang lebih dari ekspor akan memperburuk posisi neraca pembayaran luar negeri dan mengancam deficit APBN hingga menurunkan aktivitas ekonomi.⁷⁴

2. Teori Inflasi

a. Teori Kuantitas

kaum klasik berpendapat bahwa tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Harga akan naik jika ada penambahan uang yang beredar. Jika jumlah barang yang ditawarkan tetap, sedangkan jumlah uang ditambah menjadi dua kali lipat, maka cepat atau lambat harga akan naik menjadi dua kali lipat.

b. Teori Keynes

Keynes melihat bahwa inflasi terjadi karena nafsu berlebihan dari suatu golongan masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang

⁷³ Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 89.

⁷⁴ *Ibid.*, 91-92.

tersedia. Karena keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan, permintaan bertambah, sedangkan penawaran tetap, yang akan terjadi adalah harga akan naik, pemerintah dapat membeli barang dan jasa dengan cara mencetak uang, misalnya inflasi juga dapat terjadi karena keberhasilan pengusaha memperoleh kredit. Kredit yang diperoleh ini digunakan untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan agregat meningkat, sedangkan penawaran agregat tetap. Kondisi ini berakibat pada kenaikan harga-harga.⁷⁵

3. Faktor dan Jenis Inflasi

Pada hakikatnya terdapat 2 (dua) faktor penting sebagai penyebab inflasi, yaitu faktor *demand* dan *supply* terhadap uang. Inflasi yang disebabkan faktor *demand* dikenal dengan *Demand Inflation*, dan yang bersumber dari faktor *supply* disebut dengan *Cost Push Inflation*. Namun, bagi negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, inflasi juga dapat ditimbulkan dari luar negeri. Sumber atau penyebab inflasi dapat dikemukakan sebagai berikut:⁷⁶

a. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Inflation*)

Kenaikan daya beli masyarakat akan mendorong pada peningkatan pengeluaran membeli barang dan jasa. Bila peningkatan permintaan tidak mampu diikuti oleh peningkatan produksi barang dan jasa, maka untuk mengantisipasi besarnya kenaikan agregate demand yang melebihi dari kemampuan menghasilkan barang dan jasa adalah dengan menaikkan harga barang dan jasa beredar maka terjadilah inflasi. Inflasi ini biasa juga dikenal dengan demand inflation.

b. Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

⁷⁵ Erika Feronika Br Simanungkalit, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*, Vol. 13, No. 3, (2020), 332-333.

⁷⁶ Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 90 - 91.

Inflasi ini juga terjadi pada kondisi perekonomian berkembang secara pesat dengan tingkat pengangguran tergolong rendah. Dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat, mendorong buruh/karyawan untuk menuntut kenaikan upah. Naiknya tingkat upah dan gaji sudah tentu menaikkan biaya produksi dan operasi. Kenaikan biaya produksi dan operasi mendorong pada kenaikan harga jual produk, sehingga terjadi inflasi.

c. Inflasi Bersumber dari Luar Negeri

Inflasi ini terjadi disebabkan kenaikan harga-harga barang impor dari luar negeri dan dapat juga karena kenaikan pesat volume ekspor. Inflasi bersumber dari kenaikan harga barang impor terutama pada barang-barang sebagai input produksi dalam negeri, seperti kenaikan harga kapital yang diimpor dalam bentuk mesin dan suku cadang untuk kelancaran proses produksi, atau karena kenaikan bahan baku atau bahan pembantu, termasuk juga karena kenaikan bahan bakar (BBM) yang diimpor. Kenaikan harga faktor input ini mendorong pada kenaikan harga jual barang dan jasa dalam negeri atau terjadi inflasi. Inflasi karena kenaikan harga input yang diimpor ini juga termasuk ke dalam "*cost push implation*".

Inflasi karena kenaikan volume ekspor, disebabkan karena volume ekspor yang tinggi akan menambah devisa negara dan akan menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional menaikkan daya beli masyarakat dan mendorong pada peningkatan permintaan barang dan jasa. Bila kenaikan permintaan barang dan jasa dalam negeri tak mampu diikuti oleh produksi barang dan jasa maka akan terjadi inflasi. Inflasi dari ekspor ini tergolong juga ke dalam "*demand inflation*".

d. Inflasi Bersumber dari Defisit APBN

Bila terjadi defisit APBN dalam jumlah yang besar maka biasanya pemerintah akan mengambil langkah-langkah menutupi defisit anggaran belanja negara tersebut dengan pinjaman luar negeri atau mencetak uang. Kedua kebijakan ini akan menambah uang beredar di dalam negeri yang tak sebanding dengan jumlah barang dan jasa beredar, maka akan terjadi inflasi

Berdasarkan pada sumber atau penyebabnya, jenis inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:⁷⁷

- a. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebih ini yang akan menyebabkan inflasi.
- b. Inflasi desakan biaya, inflasi ini terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika pengangguran sangat rendah.
- c. Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. contohnya kenaikan harga minyak.

Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁷⁸

- d. Inflasi tertutup (Closed Inflation), apabila kenaikan harga terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu. Inflasi ini terjadi apabila kenaikan harga berada diantara 10%-30% pertahun. Jenis inflasi ini disebut dengan jenis inflasi sedang.

⁷⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), 177.

⁷⁸ Mankiw Gregory, "Pengantar Ekonomi Makro", *Edisi Ketiga*, Salemba Empat Jakarta 2006, 95.

- e. Inflasi terbuka (Open Inflation), apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum. Jenis inflasi ini disebut inflasi berat karena pada inflasi ini kenaikan harga berada diantara 30%-100% pertahun.
- f. Inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi), apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan karna nilai uang yang terus merosot. Inflasi ini terjadi jika kenaikan harga berada di atas 100% pertahun.

4. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Inflasi

a. Kebijaksanaan Fiskal atau Perpajakan

Kebijaksanaan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah melakukan kebijaksanaan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregate dalam perekonomian. Dalam kondisi inflasi pihak pemerintah berusaha mengurangi pajak pendapatan yang dikenakan pada masyarakat dengan harapan daya beli masyarakat yang berpendapatan tetap khususnya dapat bertambah dan mampu menambah pembelian barang dan jasa, sehingga meningkatkan pengeluaran agregat. Selanjutnya pengeluaran agregate dapat ditingkatkan lagi dengan menaikkan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa dibutuhkan, yang selanjutnya akan menambah investasi pemerintah. Dalam kondisi inflasi memungkinkan tercapai tingkat penggunaan tenaga penuh (full employment) dan kenaikan harga-harga semakin pesat, maka selanjutnya diperlukan menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini akan mengurangi pengeluaran agregate, sehingga tekanan inflasi dapat dikurangi.⁷⁹

⁷⁹ Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 93.

b. Melalui Kebijakan Moneter Mengendalikan Inflasi

Kebijakan moneter merupakan bagian kebijakan pemerintah yang dilaksanakan melalui bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia Tujuan dari kebijaksanaan ini adalah mengatur jumlah peredaran uang dalam perekonomian yang mampu memengaruhi pengeluaran agregate. Umumnya terdapat 3 (tiga) instrumen andalan dari pihak perbankan dalam menggunakan kebijaksanaan moneter antara lain:⁸⁰

1) Politik Cash Ratio

Cash Ratio Bank Umum adalah jumlah uang atau finansial Bank Umum yang harus tertahan di Bank Indonesia sebagai jaminan likuiditas Bank Umum tersebut. Cash Ratio Bank Umum tersebut ditetapkan dalam sejumlah persentase (%) dari dana atau jumlah modal yang dimiliki setiap Bank Umum. Dalam keadaan Inflasi Bank Indonesia akan menaikkan Cash Ratio Bank Umum agar mampu mengurangi jumlah uang beredar sehingga harga barang-barang dapat diturunkan.

2) Politik Diskonto

Politik Diskonto dikenakan dengan politik suku bunga deposito bank Kebiasaan masyarakat akan tertarik menabungkan uangnya bila suku bunga bank tinggi dan enggan untuk melakukan pinjaman bank, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, melalui politik diskonto maka dalam kondisi inflasi pihak perbankan akan menaikkan suku bunga bank agar masyarakat banyak menabung sehingga jumlah uang beredar dapat berkurang dan harga akan dapat diturunkan.

3) Politik Pasar Terbuka

Pihak Bank Indonesia dapat menerbitkan surat-surat berharga baik dalam bentuk obligasi,

⁸⁰ *Ibid.*, 93-96.

danareksa dan sebagainya. Surat-surat berharga ini dapat dijual pada masyarakat sehingga BI mendapatkan uang tunai dan masyarakat mendapatkan surat-surat berharga. Dalam kondisi Inflasi, maka dengan politik ini pihak BI berusaha mengurangi jumlah uang beredar dari masyarakat dengan jalan menerbitkan surat-surat berharga untuk dijual ke masyarakat.

c. Kebijakan Non-Moneter

Bila kebijakan fiskal dan moneter lebih diarahkan pada pengendalian pengeluaran agregate, maka kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan moneter ini dikenal sebagai kebijakan dari segi permintaan. Sedangkan Non-Moneter lebih ditekankan pada kebijakan segi penawaran yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang relatif lebih murah dan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran dapat dilakukan dengan:⁸¹

1) Income policy

Pemerintah berusaha menekan kenaikan pendapatan pekerja, seperti mencegah kenaikan upah/gaji yang berlebihan atau melarang kenaikan upah yang melebihi dari kenaikan produktivitas pekerja, karena kenaikan upah akan menaikkan biaya produksi yang pada akhirnya akan mendorong kenaikan harga jual produk. Bila hal ini berlangsung secara terus-menerus maka timbul inflasi yang biasa dikenal dengan cost push inflation.

2) Pengawasan langsung.

Pemerintah dapat saja melakukan pengawasan langsung harga-harga barang di pasar atau melakukan operasi pasar. Dalam kondisi

⁸¹ *Ibid.*, 96-97.

inflasi pihak pemerintah berusaha menambah jumlah barang beredar di pasar agar mampu menurunkan harga.

5. Inflasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. Dalam perspektif ekonomi Islam penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya.⁸² .Dalam konsep ekonomi, Ibnu Khaldun menuangkan pemikiran ekonominya dalam salah satu karyanya yang berjudul "*Muqaddimah*". Dalam bukunya *Al-Muqaddimah*, menurutnya konsep uang adalah bahwa uang merupakan apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan. Ibnu Khaldun menjelaskan emas dan perak adalah acuan nilai dari uang artinya bahwa uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, tetapi penerbitan uang harus sesuai dengan nilai harta (cadangan) yang dimiliki oleh pemerintah. Uang tidak perlu mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak hanya sebagai standar nilai uang sehingga dengan pernyataan tersebut, pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetak. Ibnu Khaldun memprediksikan bahwa dalam perkembangan perekonomian standar uang akan mengalami perubahan. Artinya bahwa dari masa ke masa sejalan dengan

⁸² Mashudi Hariyanto, "Perspektif Inflasi Dalam Ekonomi Islam", *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2019), 79–95.

perkembangan ekonomi, standar uang yang tadinya tinggi kemudian berubah menjadi rendah.⁸³

Ekonom Islam menurut Taqiuddin Ahmad Ibn Al-Maqrizi, yang merupakan salah satu murid Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu:⁸⁴

a. *Natural Inflation*

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat (AS) atau naiknya permintaan agregatif (AD). Jika memakai analisis konvensional yaitu $MV = PY = Y$. dimana M (jumlah uang yang beredar), V (kecepatan peredaran uang), P (tingkat harga), T (jumlah barang dan jasa), Y (pendapatan nasional). Maka *natural inflation* dapat diartikan sebagai :

- 1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian (T). misalnya $T \downarrow$ sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya $P \uparrow$.
- 2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan $M \downarrow$ sehingga V dan T tetap maka $P \uparrow$.

b. *Human Error Inflation*

Human error inflation dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri, seperti korupsi dan administrasi yang buruk, percetakan uang yang dimaksud menarik keuntungan yang berlebih.⁸⁵ Hal ini sesuai dengan QS. Al-Rum ayat 41.

⁸³ Dewi, "Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi (Uang Dan Harga)", *Ekonomi Islam C2018*, 1-2.

⁸⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 140.

⁸⁵ *Ibid.*, 140-143.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Al- Rum [30]: 41).

Berdasarkan kandungan ayat diatas ialah, Zaid Ibnu Rafi' mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Telah tampak kerusakan*. Yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, akhirnya timbullah paceklik; sedangkan yang dimaksud dengan *al-bahr* ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid ibnul Muqri, dari Sufyan, dari Hamid Ibnu Qais Al-A'raj, dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya: *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut*. Bahwa yang dimaksud dengan rusaknya daratan ialah terbunuhnya banyak manusia, dan yang dimaksud dengan rusaknya lautan ialah banyaknya perahu (kapal laut) yang dirampok. Menurut Ata Al-Khurrasani, yang dimaksud dengan daratan ialah kota-kota dan kampung-kampung yang ada padanya, dan yang dimaksud dengan lautan ialah pulau-pulaunya.⁸⁶

D. Konsep Belanja Daerah

1. Definisi Belanja Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah

⁸⁶ Tafsir Ibnu Katsir, “[Http://www.Ibnukatsironline.Com/2015/09/Tafsir-Surat-Ar-Rum-Ayat-41-42.Html](http://www.Ibnukatsironline.Com/2015/09/Tafsir-Surat-Ar-Rum-Ayat-41-42.Html)”, 2015.

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.⁸⁷ Tujuan pokok dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk mewujudkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjadi daerah otonomi yang mandiri dalam rangka menegakkan sistem pemerintah NKRI sesuai dengan UUD 1945. Misi utama undang-undang tersebut adalah peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan dan pelayanan kepada masyarakat (publik), memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi yang pada intinya adalah penyelenggaraan pemerintah daerah secara partisipatif.⁸⁸ Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan dari belanja daerah dapat diklasifikasi antara lain sebagai berikut. Pertama, merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang tersedia pada suatu negara/daerah. Kedua, sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik. Ketiga, sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk pembatasan pengeluaran. Keempat, sebagai alat untuk menampung, menganalisis, serta mempertimbangkan dalam membuat

⁸⁷ Jurnal Bisnis and Kata Kunci, "Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal Analysis Determinants in Regional Shopping District / City West Java Province In Era Autonomy and Fiscal Decentralization", , Vol. 18, No. 1, (2011).

⁸⁸ Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 181-191.

keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang dilakukan.⁸⁹

Belanja daerah yang termasuk dalam pengeluaran pemerintah. Dalam teori adolf Wegner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wegner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wegner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.⁹⁰

2. Teori Belanja Daerah

Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah dimasukkan dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara) disebut kebijaksanaan fiskal. Pengeluaran pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran negara dan pengeluaran daerah.⁹¹ Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah

⁸⁹ Amin Fadillah, "Penganggaran Di Pemerintah Daerah (Dalam Perspektif Teoritis, Normatif, Dan Empiris)", (Malang: UB Press, 2019), 18.

⁹⁰ Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 181-191.

⁹¹ *Ibid.*, 180.

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

a. Teori Keynesian

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y=C+I+G+(X-M)$ merupakan pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.⁹²

b. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.⁹³ Dalam belanja daerah terdapat alokasi belanja modal yang disebut sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang

⁹² M. Zahari MS, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi", , Vol. 1, No. 1, (2017). 187.

⁹³ Karya and Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen*, 181.

ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relative perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.⁹⁴

c. Teori Rostow dan Musgrave

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada awal tahap perkembangan ekonomi presentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.⁹⁵

3. Jenis Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung , terdiri dari:

⁹⁴ Rudi Bahrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012).

⁹⁵ Merri Anitasari and Ahmad Soleh, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu", *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (2015). 120.

- 1) Belanja pegawai, Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- 2) Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- 3) Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.
- 4) Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/ BUMN/ BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan
- 5) Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada

organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 6) Belanja bagi hasil, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 7) Belanja bantuan keuangan, adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
 - 8) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.⁹⁶
- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

⁹⁶, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021*, (Badan Pusat Statistik, 2022), 7-11.

- 2) Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- 3) Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun.⁹⁷

4. Belanja Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan, dan mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.⁹⁸

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Islam berpegang pada terpenuhinya semua pemuasan kebutuhan primer (basic needs) tiap-tiap individu, dan kebutuhan sekunder (alhajat, al-kamaliyyah). *Concern* suatu negara

⁹⁷ *Ibid.*, 11- 12.

⁹⁸ Jurnal Ekonomi Syariah, "Jurnal Ekonomi Syariah", , Vol. 11, No. September, (2022), 182.

Islam harus lebih difokuskan kepada pendistribusian ekonomi secara merata. Dengan pendistribusian yang merata akan terjamin keadilan di tengah masyarakat dan juga tidak akan ada jurang pemisah yang tajam antara si kaya dan si miskin. Dengan prinsip keadilan tersebut, akan terjamin kebutuhan primer secara menyeluruh bagi tiap individu rakyat, di samping masing-masing individu akan mampu memenuhi kebutuhan sekundernya.⁹⁹ Pengeluaran dalam negara Islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karakteristik struktur perekonomian sehingga secara tidak langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil.¹⁰⁰ Hal ini dijelaskan dalam QS. Al Hashr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,

⁹⁹ Lilik Rahmawati, “Kebijakan Fiskal Dalam Islam”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 Des, (2008), 455.

¹⁰⁰ Syariah, “Jurnal Ekonomi Syariah.”

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S. Al- Hashr [59]:7)

Karakteristik pengeluaran dalam sistem Islam paling tidak dapat dibagi dua, yaitu karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu, misalnya zakat, *khumus*, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan orang yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq*. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan. Muhammad Nejatullah Siddiqi berpendapat bahwa besar subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan tiga macam fungsi negara. *Pertama*, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. *Kedua*, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. *Ketiga*, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan *syura*.¹⁰¹

E. Kerangka Berfikir

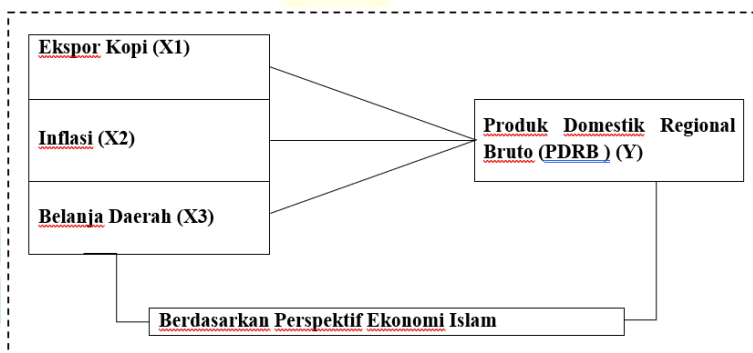
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.¹⁰² Untuk

¹⁰¹ Muh Rahman, “Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam”, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2013, 248-249.

¹⁰² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), 60.

memudahkan penelitian yang akan dilakukan maka peneliti ingin memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, di mana Ekspor Kopi sebagai variabel X_1 , Inflasi sebagai variabel X_2 dan Belanja Daerah sebagai variable X_3 dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung tahun 2014-2021 sebagai variabel Y . Dalam hal ini variabel ekspor kopi, inflasi dan belanja daerah yang akan diuji apakah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung tahun 2014-2020 dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan Regresi Linier Berganda. Penelitian ini akan dikaji sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Ekspor merupakan pengeluaran otonomi yang mempunyai efek positif keatas kegiatan ekonomi Negara karena ia merupakan pengeluaran penduduk Negara lain keatas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri.¹⁰³ Ekspor sangat berperan dalam menunjang pertumbuhan PDRB. Peningkatan ekspor akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dikarenakan berlakunya multiplier effect terhadap peningkatan daerah. *Multiplier effect* tersebut akan

¹⁰³ Sadono Sukirno, “Teori Pengantar Makro Ekonomi”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seiring dengan meningkatnya investasi di daerah tersebut.¹⁰⁴

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor inflasi. Banyak kajian membahas inflasi tidak hanya cakupan nasional, tetapi regional maupun internasional. Bagi perekonomian, inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan ekonomi, menurunkan investasi, menghambat ekspor dan maupun dapat berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran. Dari sisi kesejahteraan, inflasi yang tinggi menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat, terutama bagi pekerja-pekerja yang mempunyai penghasilan tetap, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Peningkatan inflasi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara.¹⁰⁵

Belanja pemerintah merupakan belanja daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.¹⁰⁶ Dalam instrumen belanja pemerintah terdapat alokasi belanja modal yang disebut sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang kemudian akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relative

¹⁰⁴ Almasdi Syahza, "Perkembangan Ekspor Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Riau", *Sosiohumaniora*, Vol. 5, No. 2, (2003), 148.

¹⁰⁵ Rukmana, "Pengaruh Disparitas Pendapatan, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah."

¹⁰⁶ Abdul Halim, "Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah", *Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Jakarta*2004, 4.

perubahan PDRB yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan kerangka teoritik diatas dankajian penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi yaitu ekspor, inflasi dan belanja daerah yang dalam penelitian ini akan dikaji berdasarkan perspektif ekonomi islam.

F. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.¹⁰⁸

Oleh karena itu berikut hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini :

1. Ekspor Kopi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Tahun 2014-2021.

Berdasarkan Teori basis ekonomi yang dikemukakan oleh Harry W. Richardson mendasarkan pandangannya bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor wilayah tersebut. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah.¹⁰⁹Peningkatan ekspor akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dikarenakan berlakunya multiplier effect terhadap peningkatan daerah. *Multiplier effect* tersebut akan meningkatkan Produk Domestik

¹⁰⁷ Badrudin Rudy, "Ekonomika Otonomi Daerah", *Edisi Pertama Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta*2012. 20.

¹⁰⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Kombinasi*, (Bandung: Alfabet, 2014), 99.

¹⁰⁹ Satria, Ridwansyah, and Habibi, "Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis Dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

Regional Bruto (PDRB) seiring dengan meningkatnya investasi di daerah tersebut.¹¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi, Siti hodijah, Rosmel (2020) yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Ekspor Terhadap PDRB Provinsi Jambi Periode 2000-2016.” Menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan Terhadap PDRB di Provinsi Jambi. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_1 .Ekspor komoditas kopi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Lampung tahun 2014-2021.

2. Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Tahun 2014-2021.

Menurut Model Keynesian, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat).¹¹¹ Model Keynesian terdiri dari kurva *Agregat Demand* (AD) dan *Agregat Supply* (AS), yang tepat menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan.¹¹² Inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang tidak bisa diabaikan karena inflasi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas seperti terjadinya pengangguran, menurunnya ekspor dalam negeri, meningkatnya harga-harga dan masih banyak dampak lainnya. Meningkatnya harga-harga yang digambarkan adalah besarnya tingkat inflasi dapat menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan disamping itu inflasi

¹¹⁰ Syahza, “Perkembangan Ekspor Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Riau.”

¹¹¹ Atmadja, “Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya.”

¹¹² Simanungkalit, “Pengaruh Inflasi.” 331.

dapat berdampak secara langsung terhadap pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang.¹¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ackhadi (2019) yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Kenaikan Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk terhadap PDRB provinsi Banten 2010-2017” Menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap PDRB di Provinsi Banten.

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_2 :Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Lampung tahun 2014-2021.

3. Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung Tahun 2014-2021.

Menurut pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian, Secara teori hubungan belanja daerah terhadap PDRB dapat dibuat rumus $Y = C + I + G$. Artinya bila pengeluaran pemerintah bertambah maka pendapatan (Y) akan meningkat.¹¹⁴

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Puspitasari (2021) yang berjudul “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Di Kabupaten Berau.” Menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap PDRB Di Kabupaten Berau.

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_3 :Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Lampung tahun 2014-2021.

¹¹³ Sakita Laksmi Dewi and Ida Bagus Putu Purbadharmaja, “Pengaruh PAD, PMA, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali”, *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 2 no.11, (2012), 502–512.

¹¹⁴ Amrie, Nur, and Ramadhani, “Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara.” 7

4. Pengaruh Ekspor Kopi, Inflasi, dan Belanja Daerah Secara Bersama-sama Terhadap Produk Domestik Regional bruto (PDRB) di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2014-2021.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi modern yang dikemukakan oleh Simon Kuznets yang menekankan pentingnya kemajuan teknologi, kelembagaan, dan penyesuaian teknologi dalam meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya dapat memberikan landasan konseptual yang relevan dengan penelitian dimana kemajuan teknologi dan adaptasi teknologi baru dalam sektor ekspor Lampung, berdampak positif pada pertumbuhan PDRB. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap PDRB dapat dipahami dalam konteks kelembagaan. Tingkat inflasi yang rendah atau stabil mencerminkan adanya kelembagaan yang baik, serta, pengaruh belanja daerah terhadap PDRB dapat dilihat pula dalam konteks penyesuaian teknologi. Belanja daerah yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan penelitian dan pengembangan dapat mendorong peningkatan kapasitas teknologi dan penyesuaian terhadap perubahan ekonomi. Dengan demikian, penelitian tentang pengaruh ekspor, inflasi, dan belanja daerah terhadap PDRB dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor tersebut, yang berhubungan dengan kemajuan teknologi, kelembagaan, dan penyesuaian teknologi, berinteraksi dan mempengaruhi kemampuan Lampung dalam menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya serta berdampak pada pertumbuhan PDRB.

Dalam ekonomi Islam PDRB secara fungsional akan mempengaruhi penerimaan pajak dengan meningkatnya pendapatan pajak, wakaf, zakat dan sedekah dan pendapatan lainnya akan memberikan dampak yang baik dikarenakan meningkatnya suatu penerimaan Negara maka makin optimal pengeluaran Negara dalam meningkatkan

kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.¹¹⁵ Menurut Ibn Khaldun kekayaan sebuah negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi kekayaan negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran yang positif dari negara tersebut. Negara yang makmur adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi tersebut diekspor, dan pada akhirnya akan menambah kemakmuran di negara tersebut.¹¹⁶ Perekonomian yang meningkat di awal pemerintahan akan mendatangkan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Ibn Khaldun juga menganalisa efek dari pengeluaran belanja pemerintah dalam perekonomian bahwa penurunan dalam penghasilan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah. Alasannya karena negara adalah pasar yang paling besar, dasar semua perdagangan, substansi dari pemasukan dan pengeluaran.¹¹⁷ Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran publik sangat penting. Negara merupakan faktor produksi yang penting. Dengan pengeluarannya, negara meningkatkan produksi dan dengan pajaknya negara membuat produksi menjadi lesu. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi.¹¹⁸

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_4 : Ekspor kopi, inflasi, dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

¹¹⁵ Nurjanah, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam."

¹¹⁶ Aryanti, "Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik."159

¹¹⁷ *Ibid.*,157.

¹¹⁸ Bahrul Ulum and Mufarrohah, "Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan", *Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA)*, Vol. 1, No. 2, (2016), 29.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi
Lampung tahun 2014-2021



DAFTAR RUJUKAN

.Buku

- A. Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islam Edisi Kedua* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ardianto, Elvinaro, and Bambang Q-Aness, *Filsafat Ilmu Ekonomi* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro Dan Makro* Graha Ilmu, 2008.
- Ekananda, Mahyus, *Ekonomi Internasional* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Gregory, Mankiw, “Pengantar Ekonomi Makro”, *Edisi Ketiga, Salemba Empat Jakarta* 2006.
- Gujarati, Porter, N Damor, and Dawn, *Dasar-Dasar Ekonometrika* Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* Jakarta: Kencana, 2008.
- Karya, Detri, and Syamri Syamsuddin, *Makro Ekonomi Pengantar Untuk Manajemen* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Martono, Nanang, “Metode Penelitian Kuantitatif”, In *Edisi Revisi Ke-2* Bandung: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Putong, Iskandar, “Economis: Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro”, *Edisi*, 2013.
- Sudaryono, D, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method”, 162.
- Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edited by Yeshka Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Kombinasi* Bandung: Alfabet, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & DBandung*: Alfabeta CV, 2015.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* Alfabeta CV, 2020.

Sujarweni, Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Sukirno, Sadono, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

_____, "Teori Pengantar Makro Ekonomi", *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta* 2004.

Tri Basuki, Agus, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews* Rajawali Pers, 2016.

_____, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Widarjono, Agus, *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi & Bisnis* Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Jurnal

Ackhadi, Irfan, "Pengaruh Inflasi, Kenaikan Upah Minimum Dan Jumlah Penduduk Terhadap PDRB Provinsi Banten 2010-2017", 2019.

Adisetiawan, R, "Ahmadi, 2016, The Impact of Earning Management Against Market Reaction: Empirical Evidance from Indonesia", *International Research Journal of Finance and Economics* Vol. 146, h. 112–128.

Afiyah, Siti Nurul, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Laju Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 1998-2008 Menggunakan Program Minitab 14", *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia* Vol. 5, No. 2(2011).

Amrie, Machmud Al, Adi Aspian Nur, and Amelia Ramadhani, "Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara", 2019.

Anitasari, Merri, and Ahmad Soleh, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi

- Bengkulu”, *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 3, No. 2(2015).
- Aryanti, Yosi, “Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik”, *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 2(2018).
- Atmadja, Adwin S., “Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 1 No.
- AZ, Siti Marlina, and Siska Pebrina, “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi”, *Ekonomis: Journal of Economics and Business* Vol. 3, No. 1(2019), h. 36.
- Badan Pusat Statistik, “Provinsi Lampung Dalam Angka 2022”, *BPS Provinsi Lampung* Vol. 2, No. 2(2022).
- Bahrudin, Rudi, *Ekonomina Otonomi Daerah* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Bisnis, Jurnal, and Kata Kunci, “Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal Analysis Determinants in Regional Shopping District / City West Java Province In Era Autonomy and Fiscal Decentralization”, Vol. 18, No. 1(2011).
- Boediono, Dr, “Ekonomi Moneter Edisi Ketiga”, *Yogyakarta: BPF*2014.
- Choiriyah, “Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr”, *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 2, No. 1(2016).
- Dewi, “Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi (Uang Dan Harga)”, *Ekonomi Islam* C2018.
- Dhini, Vika Azkiya, “Brasil Rajai Produksi Kopi Pada 2020, Indonesia Urutan Berapa?”, *Databoks.Katadata.Co.Id*20212020.
- Dihni, Vika Azkiya, “5 Provinsi Pengekspor Kopi Terbesar, Lampung Juara”, *Databoxs*2022,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/14/5-provinsi-pengekspor-kopi-terbesar-lampung-juara>, Accessed June 19, 2023.

- Fadillah, Amin, “Penganggaran Di Pemerintah Daerah (Dalam Perspektif Teoritis, Normatif, Dan Empiris)”, Malang: UB Press, 2019.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, and Salmah Pattisahusiwa, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah”, *Inovasi* Vol. 14, No. 1(2018), h. 44, <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>.
- H, Ardiansyah, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* Vol. 5(3)(2017).
- Halim, Abdul, “Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah”, *Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Jakarta*20044.
- Hanifah, Ulfa, “Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* Vol. 2, No. 6(2022), h. 107–126, <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.275>.
- Hariyanto, Mashudi, “Perspektif Inflasi Dalam Ekonomi Islam”, *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2(2019), h. 79–95.
- _____, *Ekonomi Pembangunan Islam* Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik, “Warta Ekspor”, 2018.
- Karisma, Ameilia, and Ady Soejoto, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Penganggaran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur”, *Ekonomi Dan Bisnis*20101–15.
- Karlita, Batari Saraswati, “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Ekspor Terhadap PDRB Sektor Industri Di Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*2013.
- Kartika, Wilda, H M Mozart B Darus, and Sri Fajar Ayu, “Analisis Kontribusi Ekspor Kopi Terhadap PDRB Sektor Perkebunan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Ekspor Kopi Sumatera Utara”, *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics* Vol. 2, No. 10(2013).
- Laksmi Dewi, Sakita, and Ida Bagus Putu Purbadharmaja, “Pengaruh PAD, PMA, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali”, *E-Jurnal EP Unud* Vol. 2 no.11(2012), h. 502–512.

- Lilyana, Lilyana Loren, Selvia Hendrawan Selvia, and Yois Nelsari Malau, "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Ekspor Terhadap Pdrb Di Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2019", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*Vol. 4, No. 3(2020), h. 1711–1724.
- Maulidizen, Ahmad, "Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer Pendahuluan Nilai-Nilai Islam Yaitu Al-Qur " an Dan Al-Hadith . Ekonomi Islam Juga Merupakan", Vol. 1, No. 1(2017).
- Maysari, Nichauri Elsa, "Analisis Pengaruh Ekspor, UMP, Dan PMA Terhadap PDRB Di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Ekonomi*Vol. 6, No. 2(2022), h. 168–177.
- Moch. Zainuddin, "Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam", Vol. 1(2017).
- MS, M. Zahari, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi", Vol. 1, No. 1(2017).
- N Gujarati, Damodar, *Basic Econometrics. Third Edition*Sagusingapore: Mc.Grawn-Hill, 1995.
- Nurjanah, Siti, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2005-2017 Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam", *Economic Journal*2018.
- Pattikawa, Silfia Nadilla, and Kezia Yohanna Zai, "Peningkatan PDRB Kota Padang Melalui Industri Pariwisata", *Manajemen Ekonomi Keuangan Dan Akuntansi (MEKA)*Vol. 2, No. 1(2021), h. 95–98.
- Provinsi Lampung, BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2017-2021*, Edited by Nurul Andriana and Drisnaf SwastyardiLampung: BPS Provinsi Lampung, 2022.
- Puspitasari, Lisa, and Universitas Muhammadiyah Berau, "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Di Kabupaten Berau", *Eco-Build Journal*Vol. 5, No. 1(2021).
- Putri, Lucky Riana, "Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota Surakarta", *Cakra Wisata*Vol. 21, No. 1(2020).

- Rahim, Abdul, and Andi Samsir, "Analysis The Influence of Investment Level, Government Spending , Labor To Economic Growth In Bulukumba District", 2018.
- Rahman, Muh, "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam", *Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*2013.
- Rahmawati, "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan", *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*Vol. 2, No. 1(2019).
- Rahmawati, Lilik, "Kebijakan Fiskal Dalam Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*Vol. 11, No. 2 Des(2008).
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*Deepublish, 2020.
- Rudy, Badrudin, "Ekonomika Otonomi Daerah", *Edisi Pertama Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta*2012.
- Rukmana, Indra, "Pengaruh Disparitas Pendapatan, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah", *Economics Development Analysis Journal*Vol. 1, No. 1(2012), h. 27–34.
- Sari, Milya, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", Vol. 6, No. 1(2020).
- Satria, Anggel Dwi, Ridwansyah, and Ahmad Habibi, "Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis Dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Vol. 9, No. 01(2023).
- Simanungkalit, Erika Feronika Br, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Journal of Management Small and Medium Enterprises (SMEs)*Vol. 13, No. 3(2020), h. 327–340.
- _____, "Pengaruh Inflasi", *Journal of Management*Vol. 13, No. 3(2020).
- Siregar, P Pardomuan, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", Vol. 1, No. 1(2021).

- Syahza, Almasdi, “Perkembangan Ekspor Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Riau”, *Sosiohumaniora* Vol. 5, No. 2(2003), h. 148.
- Syaikhon, Ahmad, “Pembiayaan Ekspor Syariah - Oleh: Agustianto, Ketua DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)”, *Harian Ekonomi NERACA* 2014.
- Syariah, Jurnal Ekonomi, “Jurnal Ekonomi Syariah”, Vol. 11, No. September(2022), h. 187–208.
- Taher, Salbia, and Antje Tuasela, “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika”, Vol. 3(2019).
- Tarmizi, Siti Hodijah, and Rosmeli Rosmeli, “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing Dan Ekspor Terhadap PDRB Provinsi Jambi Periode 2000- 2016”, *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter* Vol. 8, No. 3(2020).
- Tarmizi, Tarmizi, Siti Hodijah, and Rosmeli Rosmeli, “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing Dan Ekspor Terhadap PDRB Provinsi Jambi Periode 2000-2016”, *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter* Vol. 8, No. 3(2020), h. 155–164.
- Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surah An-Nisa 29 Dan At-Taubah 34)”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 17 no.2(2018), h. 249.
- Ulum, Bahrul, and Mufarrohah, “Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan”, *Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA)* Vol. 1, No. 2(2016).
- Vinsensia Arniaty, Sihotang, “Hubungan Kebiasaan Minum Kopi Dengan Peningkatan Tekanan Darah Pada Masyarakat Di Desa Ponjian Pegagan Julu X Sumbul Kabupaten Dairi”, 2019.
- Yulianto, Wakhid, “Pengaruh Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Toko Aleca Shopid Kebumen”, *Journal of Business and Economics Research (JBE)* Vol. 1, No. 2(2020), h. 168–172.
- Zainuddin, Moch, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal: Stain Kediri, Hlm* Vol. 1 No.2(2017), h. 126.

Web

Agama, Departemen, and RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* Bandung, Diponegoro, 2010.

Bps, Katalog, “Kerjasama : BAPPEDA Kabupaten Kudus Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)”, 2012.

BPS, Katalog, “PDRB Tahun 2010”, .

Katsir, Tafsir Ibnu,
“[Http://Www.Ibnukatsironline.Com/2015/09/Tafsir-Surat-Ar-Rum-Ayat-41-42.Html](http://Www.Ibnukatsironline.Com/2015/09/Tafsir-Surat-Ar-Rum-Ayat-41-42.Html)”, 2015.

